

BAB II

PLATFORM DEMOKRATISASI DAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH

Demokrasi secara literal berarti kekuasaan oleh rakyat. Istilah demokrasi populer pada abad ke- 5 SM. Demokrasi pada awalnya merupakan sebuah kritik terhadap pemerintahan monarki serta kediktatoran di Negara Yunani Kuno¹⁸. Pada saat ini, demokrasi dianggap sebagai sebuah pemikiran yang mengimplementasikan perjuangan serta nilai- nilai untuk kebebasan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Berbagai nilai terkandung dalam demokrasi. Bukan hanya tentang kekuasaan suara mayoritas dalam partisipasi rakyat, namun juga nilai- nilai pluralism, persamaan serta kebebasan dalam menentukan pilihan. Demokrasi telah diterima oleh hampir seluruh Negara di dunia. Bahkan tidak jarang, Negara otoriter pun menggunakan istilah “demokrasi” untuk menutupi ke-otoriteran mereka. Bisa kita katakan, demokrasi merupakan “slogan wacana politik kontemporer” yang dimana lahirnya berbagai pengertian demokrasi seperti; Demokrasi Liberal, Demokrasi sosialis serta pengertian lainnya.

Dalam bab 2 ini penulis akan menjelaskan tentang upaya Amerika Serikat melakukan demokratisasi di Timur Tengah serta demokratisasi dan bangkitnya politik Islam di Timur Tengah.

A. Arah Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah

Kebijakan luar negeri suatu Negara bergantung pada kepentingan Negara itu sendiri. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang memiliki sedikitnya tiga kepentingan di Timur Tengah. Menurut Bowman (2008:78), kepentingan Amerika yang *pertama* adalah mengamankan dan tidak adanya rintangan aliran minyak yang mengalir dari kawasan teluk Persia ke Amerika Serikat serta Negara- Negara industry lainnya, kepentingan ini merupakan kepentingan jangka panjang. Untk

¹⁸ Prof. Dr. Masykuri Abdillah, *Islam Dan Demokrasi Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi 1966- 1993* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015).

mengamankan kepentingan tersebut, maka Negara- Negara Barat perlu menjaga cadangan minyak dari serangan teroris atau gangguan dari Negara musuh. *Kedua*, kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah adalah memastikan tidak adanya actor Negara ataupun non- Negara yang memproduksi, memperoleh atau menggunakan senjata pemusnah massal (*Weapon of Mass Destruction*) (Bowman, 2008: 79). Negara yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat pada saat ini adalah Iran. Iran memamerkan kepada dunia senjata pemusnah massal yang membuat Amerika merasa tidak aman. *Ketiga*, membantu Timur Tengah agar tidak menjadi sarang ataupun pengeksport ekstrimis Islam (Bowman, 2008: 80). Ekstrimisme Islam disini adalah kelompok- kelompok Islam yang berusaha memperjuangkan kembali tegaknya Negara Islam. Hal tersebut membuat Amerika Serikat berusaha melawan ekstrimisme ini. Para kelompok ekstrimisme melakukan kekacauan sehingga mengganggu kepentingan Amerika di Timur Tengah. Selain itu ketakutan Amerika juga bertambah apabila senjata pemusnah massal jatuh ke tangan para kelompok ekstrimis, korban yang berjatuhannya tentu akan berlipat kali lebih banyak.

Urusan memberantas teroris ini kemudian menjadi urusan bersama. Para pemimpin dunia tunduk pada tuntutan Amerika Serikat. Hal tersebut disebabkan ketakutan Negara- Negara lain akan serangan teroris. Perang melawan teroris pun mulai dikibarkan. Amerika Serikat mengeluarkan berbagai kebijakan untuk keamanan nasionalnya. Kebijakan- kebijakan tersebut diantaranya adalah:

1. US Patriot Act

Ketakutan Amerika Serikat terhadap teroris semakin bertambah setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 dimana dalam kejadian tersebut menewaskan banyak warga Amerika serta menghancurkan menara kembar World Trade Center yang merupakan simbol Negara tersebut. Hal tersebut membuat Amerika mengeluarkan *USA Patriot Act* yakni sebuah Undang- undang yang disahkan oleh kongres dan isinya melegitimasi semua tindakan terorisme yang mengancam Amerika. Selain itu, Undang- undang ini juga memberikan otoritas kepada lembaga- lembaga intelejen

untuk dapat melakukan penyadapan telepon, melakukan rekaman serta penyadapan pada komputer.

USA *Patriot Act* diperkuat dengan adanya Doktrin Bush yang mengandung *Preemptive Action* untuk dapat menyerang lebih awal terhadap sasaran yang dianggap mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Berikut merupakan cara- cara yang dilakukan oleh USA *Patriot Act*, diantaranya:

- a. Mengijinkan para petugas hukum untuk menggunakan alat- alat yang telah disediakan untuk mengamankan kejahatan- kejahatan terorganisir seperti pengedaran narkoba.
- b. Badan- badan penegak hukum di seluruh wilayah Amerika Serikat saling memberikan informasi serta melakukan kerjasama.
- c. Menyediakan peralatan berteknologi tinggi yang berguna untuk melakukan pelacakan serta penyidikan apabila dicurigai adanya ancaman yang mengarah pada tindakan teroris.
- d. Menambah hukuman terhadap para pelaku teroris yang terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hukuman tersebut juga berlaku terhadap kejahatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan teroris seperti pembakaran suatu tempat dengan disengaja.¹⁹

2. Department of Homeland Security (DHS)

Tragedy 11 September 2001 meninggalkan duka serta trauma mendalam bagi Amerika Serikat, bahkan Amerika sendiri memasukan peristiwa tersebut kedalam kategori perang. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, Presiden Bush mengeluarkan sebuah pengumuman tentang pembentukan suatu kantor yang dikenal dengan nama *Office of Homeland Security (OHS)*. *OHS* ini sendiri berdiri tanggal 21 September 2001. Fungsi dari *OHS* ini adalah sebagai

¹⁹ United States Government, 'The USA PATRIOT Act : Preserving Life and Liberty', in *USA Department of Justice*, 2001 <http://www.justice.gov/archive/ll/what_is_the_patriot_act.pdf>.

coordinator dari sekitar 40 cabang pemerintah yang memiliki tugas memerangi teroris. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2002, Presiden Bush mengusulkan pembentukan *Department of Homeland Security (DHS)*. Departemen ini akan menyatukan sekitar 22 cabang pemerintahan di bawah departemen tunggal. *DHS* ini juga memiliki tugas pokok, yakni diantaranya: melindungi perbatasan, bandara-bandara, pelabuhan- pelabuhan, kemudian memonitor pendatang asing yang datang ke Amerika, mengatur kesiapsiagaan serta membantu melengkapi responder awal. Dapat kita simpulkan bahwa *DHS* memiliki empat tugas pokok, diantaranya²⁰:

- a. Menjaga perbatasan serta pusat- pusat transportasi, dengan melakukan hal ini *DHS* diharapkan dapat mencegah masuknya teroris ke wilayah Amerika Serikat.
- b. *DHS* bekerjasama dengan keamanan local setempat agar dimana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat direspon dengan cepat.
- c. Melakukan kerjasama dengan para peneliti untuk mengembangkan teknologi yang dapat mendeteksi adanya bahaya khususnya bahaya dari senjata kimia, radiologi, biological dan yang paling ditakutkan yakni senjata nuklir
- d. Menganalisis informasi- informasi yang berkaitan dengan informasi intelejen yang masuk ke semua wilayah Amerika Serikat serta menganalisa gambaran ancaman yang akan datang ke wilayah Amerika.

Selain itu, secara umum, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh keinginan Negara tersebut untuk memperluas demokrasi atau melakukan demokratisasi Negara- Negara yang belum menganut paham demokrasi. Karena politik luar negeri merupakan hasil dari interaksi lingkungan domestic dan lingkungan internasionalnya, maka begitupun dengan politik luar negeri Amerika Serikat. Kebijakan Luar Negeri Amerika dibuat dengan alasan untuk

²⁰ DHS, 'Brief Documentary History of the Department of Homeland Security 2001-2008', 2008, p. 35.

memenuhi kepentingan nasionalnya, walaupun mereka berdalih kebijakan tersebut juga demi kepentingan masyarakat internasional.

3. US National Security Strategy

Serangan teroris yang terjadi pada 9 November 2001 membuat Amerika Serikat melakukan evaluasi terhadap keamanan nasionalnya. Selain melakukan evaluasi tersebut, Amerika Serikat juga merumuskan kembali strategi keamanan sehingga terbitlah sebuah dokumen yang bernama *The National Security Strategy of the USA (USS)* pada 18 September 2002. Isi dari dokumen tersebut adalah perubahan konsep keamanan nasional serta memasukan konsep *preemption* yang berfokus pada kemungkinan terjadinya serangan teroris serta adanya penyebaran senjata pemusnah massal yang benar-benar menjadi ketakutan Amerika Serikat. Konsep *preemption* berarti inisiatif untuk melakukan aksi yang dapat melumpuhkan para teroris bahkan sebelum para teroris tersebut menyerang²¹.

Konsep ini tidak dianjurkan karena sebetulnya dapat mengundang konflik yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan konsep ini dapat mendorong Negara- Negara lain yang juga merasa terancam oleh teroris untuk melakukan hal yang sama sehingga terjadi ketidakamanan internasional. Doktrin yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat ini ditakutkan sebagai pembenaran terhadap pembenaran terhadap Negara lain terlebih dahulu dengan dalih bahwa Negara tersebut merupakan sarang teroris sehingga mengancam negaranya.

Menurut *NSS*, Amerika Serikat menggolongkan Negara- Negara yang mengancam keamanan negaranya sebagai *Rogue State*. *Rogue State* sendiri memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Suatu Negara yang pemerintahannya selalu bertindak ofensif serta bertindak dictator yang seringkali

²¹ Michael E O'Hanlon, Susan E Rice, and James B Steinberg, *The New National Security Strategy and Preemption*, *Brookings Policy Brief* (Washington, DC, 2002).

mengeksploitasi sumber daya nasional demi kepentingan penguasa.

- b. Selalu mengabaikan hukum internasional sehingga mengancam Negara- Negara sekitarnya
- c. Terdapat senjata pemusnah massal didalam negaranya. Selain itu memiliki teknologi militer maju yang digunakan untuk mengancam.
- d. Menyokong kegiatan terorisme dalam dunia internasional.
- e. Memperlihatkan sikap bermusuhan dengan Amerika Serikat serta menolak adanya penghargaan nilai- nilai kemanusiaan.

Doktrin NSS-2002 yang merupakan kebijakan keamanan Amerika Serikat terbaru yang tergolong agresif. Kesimpulan isi dari NSS-2002 diantaranya²²:

- a. Kesuksesan hanya dapat diraih dengan menerapkan kebebasan serta demokrasi. Amerika Serikat berkeinginan untuk menjadi “Kiblat Ekonomi” bagi seluruh Negara. Dalam konteks doktrin ini, Amerika mengharapkan setiap Negara untuk tidak melakukan pembatasan terhadap pengembangan kapitalis internasional karena hal tersebut dianggap akan membahayakan keamanan Negara.
- b. Amerika Serikat mengklaim memiliki hak untuk menyingkirkan berbagai ancaman- ancaman terhadap negaranya dengan melakukan serangan terlebih dahulu bahkan sebelum diserang. Hal tersebut dianggap berbahaya. Karena apabila terjadi maka akan mengancam keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat mengancam perlawanan dari berbagai Negara yang tidak terima dengan tindakan semena- mena Bush.
- c. Penanggulangan masalah teroris akan dilakukan Amerika Serikat dengan cara pengembangan militer. Oleh sebab itu, Amerika Serikat merasa perlu adanya

²² Sri Winingsih, ‘Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Pengembangan Nuklir Iran’, 2009.

pengembangan teknologi militernya baik dengan cara mengembangkan pertahanan rudal.

Terdapat banyak dampak buruk yang diakibatkan dari sikap arogan Amerika Serikat, seperti²³:

- a. Pernyataan Presiden Bush, yakni “*either you are with us or you are with the terorusts*” secara tidak langsung mengatakan bahwa dunia saat ini terpecah belah menjadi dua kubu, yaitu kubu baik dan kubu jahat. Persepsi demikian menyulitkan Negara- Negara yang tidak ingin masuk ke dalam daerah orbit Amerika Serikat. Selain itu, sikap Amerika Serikat yang juga sulit untuk mendengarkan pendapat Negara lain tentang memerangi terorisme yang tidak harus berada dibawah komando Amerika Serikat. Negara- Negara lainnya menyayangkan sikap Amerika Serikat yang arogan, karena banyak Negara miskin serta keterbelakangan yang jauh lebih membutuhkan perhatian ketimbang dengan masalah teroris. Sikap arogansi Amerika tersebut membuktikan bahwa Amerika hanya ingin melindungi negaranya sendiri ketimbang melindungi dunia internasional.
- b. Dunia internasional mengkhawatirkan berubahnya penilaian Amerika Serikat terhadap sebuah Negara yang disebabkan oleh kejadian 11 September 2001. Selain itu, Amerika Serikat juga lebih terfokus pada terorisme daripada isu HAM serta isu demokrasi.
- c. Amerika Serikat cenderung mengaitkan Islam dengan terorisme. Hal tersebut kemudian diperumit dengan adanya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Negara- Negara Islam. Amerika seringkali melakukan tekanan- tekanan politik di Negara- Negara Islam karena adanya kecurigaan keterlibatan Negara- Negara tersebut dengan teroris. Kecurigaan tersebut juga berdampak pada ketegangan- ketegangan antara Amerika Serikat

²³ Rizal Sukma, *Keamanan Internasional Pasca 11 September : Terorisme , Hegemoni As Dan Implikasi Regional*, 2003.

dengan kelompok- kelompok Muslim di berbagai Negara.

- d. Doktrin *Preemption* menjadikan Amerika dapat dengan sepihak melakukan tindakan militer terlebih dahulu untuk dapat menghancurkan berbagai hal yang dianggap sebagai ancaman bagi Amerika Serikat sendiri. Doktrin ini sangat jelas membuat dunia internasional menjadi resah. Hal tersebut karena dapat memunculkan kecurigaan- kecurigaan terhadap suatu Negara sehingga menimbulkan konflik baru yang mungkin lebih besar.
- e. Pendekatan militer dianggap sebagai pendekatan terbaik oleh Amerika. Hal tersebut dikarenakan Amerika merupakan Negara adidaya tunggal. Ambisi Amerika Serikat terhadap militer dibuktikan dengan adanya aksi serangan militer ke Irak. Amerika Serikat juga tidak tanggung- tanggung untuk mengucurkan dana yang sangat besar kepada Negara koalisi yang diharapkan dapat membantu memberantas teroris.

Di Negara Suriah, Amerika Serikat memberikan dukungan kepada para milisi bersenjata untuk memerangi rezim Bashar Asad. Adanya kepentingan ekonomi- politik di Timur Tengah menjadikan Amerika Serikat mensuplai persenjataan bagi para milisi separatistis yang berada di Timur Tengah. Hal ini menjadikan Amerika Serikat menjadi suportir senjata yang sangat besar ke Timur Tengah. Keuntungan yang di dapat dari hasil suportir senjata ini sangatlah besar.

Ada sebuah kebijakan yang disebut dengan Kebijakan Intervensionis Amerika Serikat di Timur Tengah. Kebijakan ini jelaslah tidak terlepas dari posisi Amerika Serikat di NATO. NATO merupakan satu organisasi militer pada masa Perang Dingin yang merupakan tandingan Pakta Warsawa. Namun pada saat ini NATO merupakan organisasi militer besar yang tidak ada tandingannya serta digunakan Amerika Serikat sebagai instrument miloiternya. Melihat dari hal ini, Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat berimplementasi pada dua paradig, yakni:

- a. Paradigm Munich yang kemudian paradigma ini menekankan pada sikap kehati-hatian akan datangnya pesaing baru dalam politik internasional. Sehingga diperlukan adanya pembangunan serta pemeliharaan kekuatan militer baru yang lebih modern. Selain itu, penambahan pengiriman pasukan ke Luar Negeri dengan jumlah yang lebih besar.
- b. Belajar dari kegagalan dalam Perang Vietnam, Amerika Serikat kemudian lebih menekankan diplomasi daripada kekuatan militer. Paradigm ini muncul dalam pidato Barack Obama pada tahun 2007.

Dalam melakukan demokratisasi di Timur Tengah, Amerika Serikat menyerukan reformasi politik di kawasan tersebut. Negara ini menggunakan pendekatan universal yang digunakan untuk moralitas, serta menggaungkan iadanya perbaikan kehidupan di Timur Tengah untuk membuat kehidupan di Timur Tengah menjadi lebih baik. Hal tersebut tentunya hanyalah sebah pembenaran atas berbagai hal jyang telah dilakukan oleh Amerika untuk melancarkan proses demokratisasi di Timur Tengah. Menilai Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat tidak akan terlepas dari peranan neokonservatif. Amerika Serikat menekankan bahwa berbagai Kebijakan Luar Negeri yang mereka keluarkan bukan hanya pada saat kepentingannya terancam, namun juga ketika nilai-nilai kebebasan serta demokrasinya juga terancam.

Tidak banyak yang tahu bahwa dalam membuat Kebijakan Luar Negerinya, Amerika Serikat berpegang teguh pada Doktrin *Israel First*. Doktrin ini menjadi landasan atau dasar utama Amerika Serikat dalam membuat Kebijakan Luar Negeri yang menyangkut kawasan Timur Tengah. Setiap orang mengetahui apabila Israel merupakan sekutu sejati Amerika Serikat. Israel yang merproklamirkan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948 dipimpin serta dikuasai oleh orang Yahudi. Hegemoni kaum Yahudi juga sampai pada Amerika sebagai sekutu setia Israel. Kegiatan politik Amerika dipantau oleh sebuah lembaga Yahudi yang dikenal dengan sebutan AIPAC (*American Israel Public Affairs*

Committee). Lembaga yang dibangun pada tahun 1950-an tersebut dibentuk untuk menjaga kepentingan Israel di Amerika. AIPAC memiliki sekitar 150 orang staff dengan budget per-tahun sekitar 15 juta dollar. Dana sebanyak itu dikumpulkan dari para diaspora Israel yang dianggap dapat hidup layak serta nyaman di Amerika Serikat sedangkan saudara mereka di Israel setiap hari harus berhadapan dengan konflik bahkan yang lebih menakutkan adanya bom bunuh diri yang dilakukan oleh musuh mereka yakni Palestina.

Orang-orang Yahudi menggunakan media massa untuk dapat mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri yang akan dikeluarkan oleh Gedung Putih. Tidak dapat dipungkiri memang apabila orang-orang Yahudi mempengaruhi jaringan media massa di seluruh dunia. Sekitar kurang lebih 80% kaum Yahudi menguasai media massa Amerika Serikat. Para media massa yang berada di bawah kontrol Yahudi kemudian melakukan rekayasa informasi serta menggiring opini para pejabat Gedung Putih guna kehendak mereka dapat terwujud. Cara lain yang dilakukan kaum Yahudi di Amerika adalah dengan cara mengangkat pamor para pejabat politik Amerika agar dapat menang pada saat pemilu dan mereka juga melakukan hal sebaliknya terhadap orang-orang yang tidak mereka sukai agar gagal dalam pemilu.

Kaum Yahudi Amerika Serikat menguasai sumber keuangan serta sumber ekonomi Negara tersebut. 20% milyader yang berada di Amerika Serikat adalah orang Yahudi, padahal populasi Yahudi disana hanya 3%. Bahkan mereka tak segan untuk menginfiltrasi Kongres, pemerintahan serta Dewan Tinggi Amerika Serikat untuk mempengaruhi Kebijakan Luar Negerinya. Kondisi ini meyakinkan dunia bahwa Yahudi dapat membuat sebuah program terencana untuk melancarkan kepentingan mereka.

Bukti bahwa Amerika Serikat berpihak pada Israel yakni pada masa pemerintahan Presiden Bush, Amerika Serikat menyerang Irak dengan alasan Negara tersebut memiliki senjata pemusnah massal yang akan mengancam keamanan internasional. Pada kenyataannya, Amerika

Serikat hanya ingin melucuti senjata Irak agar militer Arab tidak mengancam Israel. Hal tersebut dikarenakan Irak merupakan satu- satunya Negara Arab yang behrani menyerang Israel. Irak menyerang Israel dengan menggunakan rudal *Scud* pada saat Perang Teluk pada 1991. Akibatnya, Amerika Serikat tidak akan membiarkan satu Negara di Timur Tengah pun memiliki kekuatan militer yang akan sama atau bahkan melebihi Israel. Selain hal tersebut, adanya keinginan Amerika Serikat untuk menguasai minyak yang terdapat di Irak. Irak merupakan Negara dengan sumber cadangan minyak yang sangat besar. Tidak heran apabila kemudian Amerika Serikat yang paling banyak menggunakan energi alam kemudian ingin menguasai minyak bumi yang terdapat di Irak.

Pembelaan Amerika Serikat terhadap Israel juga terlihat dari sikap berat sebelah pada saat terjadi konflik anantara Israel- Palestina. Israel yang tiba- tiba menyerang Palestina dengan cara yang membabi buta dengan menggunakan kekejaman serta kekejrasan yang bisa dikatakan sangan melanggar HAM. Hal tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa yang sangat banyak. Amerika Serikat berpenhjcepat bahwa hal yang dilakukan oleh Israel adalah benar. Karena Israyel melakukan pembelaan dengan cara menyerang sarang teroris yang berada di Palestina. Namun, hal sebaliknya akan dilakukan oleh Amerika apabila Palestina melakukan penyerangan terlebih dahulu. Tindakan yang dilakukan Palestina akan dinilai sebagai tindakan teroris yang akan membahayakan bukan hanya Israel namun juga dunia Internasional.

B. Demokrasi dan Politik Islam di Timur Tengah

Wilayah Timur Tengah merupakan wila yah yang strategis. Di samping memiliki kebudayaan masa lampau yang menarik untuk dipelajari, Timur Tengah juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Kandungan mineral seperti tembaga, batu bara dan besi menjadi daya tarik bagi negara lain. Aset berharga Timur Tengah bertambah setelah

ditemukannya minyak bumi pada tahun 1930-an khususnya di sekitar daerah- daerah teluk²⁴.

Hal tersebut tentunya menjadi incaran bagi berbagai negara maju sehingga mereka terdorong untuk melakukan intervensi, termasuk Amerika. Berbagai cara dilakukan oleh Amerika dalam melakukan intervensi tersebut, salah satu nya dengan membuat propaganda bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan yang sempurna. Gejolak Arab Spring telah membuktikan bahwa demokrasi mulai menguasai Timur Tengah. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa demokratisasi yang terjadi di Timur Tengah termasuk salah satu bentuk intervensi yang dilakukan oleh Amerika.

Demokratisasi Timur Tengah sebelumnya dianggap sebagai sebuah ketidakmungkinan karena melihat agama yang dianut oleh negara- negara Timur Tengah, yakni Islam. Islam dan demokrasi dinilai sebagai dua hal yang tidak bisa berjalan seiringan. Berkembangnya pemikiran Islam bahwa pemimpin merupakan kepanjangan tangan dari Tuhan dan yang terpilih menjadi pemimpin merupakan utusan Tuhan menjadikan negara- negara di Timur Tengah memiliki sistem pemerintahan monarki.

Islamisme telah terjadi di Timur Tengah .Dimana Islam bukan hanya menjadi agama yang dianut, melainkan sudah masuk ke dalam ranah politik. Politik Islam menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi dalam berpolitik bukan sekadar sebuah agama ataupun kepercayaan. Dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, para Kelompok Reformasi menggunakan Islam untuk menyatukan individu- individu yang sering terlibat dalam gerakan Islam, kemudian mengintegrasinya menjadi sebuah gerakan sosial baru yang bertujuan untuk membawa perubahan dengan adanya demokrasi, kebebasan serta keadilan sosial²⁵. Namun, Arab Spring terjadi bukan sekadar karena

²⁴ Memetakan Konflik and others, 'Memetakan Konflik Di Timur Tengah (Tinjauan Geografi Politik) Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor1 Tahun 2013', 1 (2013).

²⁵ Shafira Elnanda Yasmine, 'Arab Spring : Islam Dalam Gerakan Sosial Dan Demokrasi Timur Tengah Arab Spring : Islam within Social Movement

persamaan agama yang dianut. Melainkan Arab Spring murni terjadi karena adanya persamaan nasib dalam ketimpangan ekonomi dan tidak adanya kesejahteraan dalam masyarakat

Pemimpin yang terlalu arogan serta diktator kelas kakap yang memimpin negara- negara Timur Tengah, membuat rakyat Timur Tengah berpikir bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk bergerak dan menyerukan perlawanan. Kesamaan agama merupakan hal kedua yang menjadi alasan para demonstran ini bersatu. Walaupun pada dasarnya kita melihat Islam sebagai alasan pertama para demonstran tersebut berkumpul dan berani menyerukan revolusi di Timur Tengah.

Lalu, bagaimana demokrasi dapat berkembang di negara Islam seperti di negara- negara Timur Tengah? Samuel P. Huntington mengatakan bahwa Islam membatasi demokratisasi. Agama dapat menjadi motivasi hidup bagi seorang Individu. Bagi umat Muslim, Islam merupakan pedoman hidup, filosofi moral, sistem kepercayaan atau perintah spiritual. Islam merupakan pedoman terlengkap bagi penganutnya. Islam berjalan di Timur tengah dalam meliputi praktik- praktik agama dan kehidupan sosial. Di dalam keduanya, Islam sudah tidak dapat dibedakan dan dipisahkan lagi²⁶.

Dalam kehidupan negara Islam Ideal, kegiatan perpolitikan haruslah mendapat persetujuan Tuhan atau tidak bertentangan dengan perintah-Nya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, agama mengatur segala bentuk kehidupan termasuk kehidupan politik sehingga seorang yang menganut agama Islam harus mengimplementasikan Islam dalam seluruh aspek kehidupannya termasuk dalam berpolitik. Dimana keputusan politik dibentuk bukan atas kehendak autokrasi atau elit politik yang berkuasa, melainkan atas hukum Tuhan yang mengatur semua. Negara dan pemerintahan yang berkuasa harus menjamin semua muslim

and Democracy in the Middle’, *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 28.2 (2015), 110–12.

²⁶ Bradley J. Cook and Michael Stathis, ‘Democracy and Islam: Promises and Perils for the Arab Spring Protests’, *Journal of Global Responsibility*, 3.2 (2012), 175–86 <<https://doi.org/10.1108/20412561211260485>>.

dapat beribadah dengan baik. Itulah yang dinamakan Negara Islam yang ideal.

Dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah ini, demokrasi dianggap sebagai sebuah titik terang dimana rakyat menginginkan kekuasaan berada di tangan mereka. Klaim tentang Negara Islam dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak mungkin sekiranya dapat dipatahkan disini. Mengingat bahwa demokrasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan menghilangkan ketimpangan yang selama ini diciptakan oleh para pemimpin otoriter tersebut. Namun pada saat yang sama hal ini merupakan sebuah tantangan, sebab menciptakan demokrasi di negara yang belum pernah berkenalan dengan demokrasi sebelumnya dan menganut Islam.

Politik Islam mengalami kebangkitan pada sekitar tahun 2000-an ini. Hal tersebut ditambah dengan adanya kemenangan yang diraih oleh Mahmoud Ahmadinejad pada tahun 2005. Kemudian di Irak, aliansi partai politik Syiah yang dianggap pro-Iran memperoleh suara sekitar 48% yang dimana merupakan suara terbesar. Fenomena besar ini dianggap sebagai sebuah kemenangan umat Muslim sekaligus merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Ini diakibatkan karena tujuan Amerika untuk memerangi teroris hanya sebagai alibi untuk memerangi kebangkitan politik Islam saja. Dibuktikan dengan penyerangan yang dilancarkan Amerika terhadap Irak dan Aghanistan.

Dilihat dari kekuatan politik islam yang sedang berjaya di Timur Tengah, Amerika Serikat dianggap sebagai Negara yang menopang rezim- rezim koruptor serta penindas. Selain itu ditambah dengan Amerika yang bersekutu dengan Israel menjadikan kedua Negara tersebut menjadi musuh bersama kekuatan politik Islam²⁷. Oleh karena itu, demokratisasi Timur Tengah dipergunakan oleh para kaum Muslim untuk menyusun kekuatan menyerang kembali Amerika Serikat beserta sekutunya.

Dalam pandangan Barat, Timur Tengah merupakan sebuah wilayah yang rawan akan konflik. Hal tersebut dikarenakan

²⁷ Riza Sihbudi, 'Dinamika Dan Kecenderungan Politik Islam Di Timur Tengah Dan Dunia Muslim', *Jurnal Politika*, 2 (2006).

Timur Tengah memiliki mayoritas orang beragama Islam. Dari sebab itu, timbullah sebuah anggapan adanya hubungan antara Muslim dan kekerasan. Mereka menganggap bahwa masyarakat Muslim menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan hingga terjadilah konflik besar- besaran. Hal tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa kekerasan merupakan jalan jihad. Terlepas dari pandangan Barat terhadap Timur Tengah yang merupakan kawasan rawan konflik, berikut adalah beberapa factor yang menyebabkan Timur Tengah menjadi rawan konflik, diantaranya²⁸:

1. Karakter budaya yang sulit dipisahkan dengan karakter alam serta lingkungan di Timur Tengah yang gersang, maka dari itu sikap temperamental merupakan hal yang menonjol dari masyarakat Timur Tengah.
2. Kekayaan minyak bumi yang melimpah membuat banyak Negara melakukan intervensi ke Timur Tengah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa potensi ekonominya tidak dapat terlepas dari Negara- negara kawasan industry seperti Amerika Serikat. Sehingga tidak heran apabila Amerika beserta sekutunya memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam yang memang tidak mereka miliki.
3. Keberadaan Israel menjadikan kepentingan Ekonomi- politik Amerika Serikat di Timur Tengah semakin besar. Amerika menganggap Israel merupakan wakilnya di wilayah Timur Tengah dan juga adanya kenyataan dominasi ekonomi- politik Yahudi di Amerika Serikat. Hal inilah yang menyebabkan seringkali Amerika memberi cap Negara- Negara Arab sebagai teroris sedangkan Israel Negara penjunjung tinggi demokrasi.

Revolusi yang terjadi di Timur Tengah berhasil merubah pola politik di Negara- Negara Arab tersebut menjadi demokrasi. Tunisia menunjukkan keberhasilan negaranya untuk menjadi Negara demokrasi dengan terlaksananya pemilu pertama pada 2011 silam. Sebagai Negara pertama yang melaksanakan pemilu, Tunisia melakukan pemilu pertama dengan partai yang berlandaskan Islam memperoleh suara terbanyak. Partai tersebut

²⁸ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah* (Jakarta: Mizan, 2007).

bernama An- Nahdhah, didirikan oleh Hasan Al- Banna pada tahun 1928. Tujuan didirikannya partai ini sesuai dengan agenda revolusi Tunisia, yakni memberantas korupsi serta melakukan pemulihan krisis ekonomi Tunisia. Hal tersebut menjadikan partai ini banyak dipilih oleh rakyat Tunisia.

Demonstrasi yang terjadi di Tunisia serta Negara Timur Tengah lainnya mengantarkan Negara- Negara Arab tersebut pada satu tatanan politik baru atas dasar solidaritas kesamaan nasib. Dari demonstrasi itu munculah kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat. Dapat dibuktikan ketika rakyat Tunisia menentang sikap otoriter pemerintah, mereka mencoba membangkang pada pendapat rezim lama yang membenarkan adanya otoriter dalam pemerintahannya, kemudian rakyat menyatakan komitmen atas demokrasi serta keadilan dan kebebasan²⁹. Para demonstran yang melakukan demo tanpa adanya kekerasan menunjukkan mereka benar- benar menunjukkan sebuah etos demokrasi baru yang kemudian tercermin dalam sebuah slogan yakni “*as- sya'b yuridu isqat al- nizam*) yang berarti rakyat menginginkan rezim lama untuk turun. Selain itu, hal ini juga mengimplikasikan bagaimana keadilan transisional digunakan dimana para individu dan juga kelompok menemukan jalan mereka menuju adanya partisipasi politik serta perbaikan masyarakat.

Demonstrasi yang terjadi di Tunisia benar- benar menunjukkan kemurnian cita- cita memperoleh kebebasan serta kesetaraan dengan dasar demokrasi tanpa adanya ikut campur agama. Demokratisasi yang terjadi di Tunisia membuka peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik serta dalam perebutan kekuasaan. Masyarakat Tunisia berpendapat bahwa seharusnya agama dan pemerintahan mendapat tempat yang terpisah. Berdasarkan survey, sekitar 78,4% warga Tunisia mempercayai bahwa seharusnya kalangan religious tidak berperan aktif dalam politik Negara, sedangkan 30,6% warganya mempercayai bahwa kalangan religious mempunyai peran dalam perpolitikan Tunisia. Kemudian berdasarkan survey lain, sekitar 78,4% warga Tunisia

²⁹ Robert Stewart Kristen J. Fisher, *Transition Justice and The Arab Spring*, One (New York: Reutledge, 2015).

setuju bahwa agama merupakan masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri Negara. Hal tersebut dikarenakan mayoritas warga Tunisia sekitar 94% meyakini revolusi dapat memberikan peluang ekonomi menjadi lebih baik serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga dapat menghapus sikap otoriter pemimpin³⁰..

Di Suriah, pemilu memang belum terlaksana. Namun, kebangkitan politik Islam sudah terasa di Negara tersebut. Berbagai gerakan Islam menyerukan Syariah Islam sebagai dasar hukum Negara. Nampaknya demokratisasi di Negara ini hanya berhasil membangkitkan semangat rakyatnya untuk melawan kesewenang-wenangan. Sejauh ini, rakyat Suriah belum menunjukkan adanya pengaruh demokrasi dalam pemerintahannya.

Situasi militer di Suriah mendekati jalan buntu pada tahun 2012. Hal ini disebabkan para pemberontak yang menguasai wilayah utara Suriah mengalami kesulitan dalam penyediaan persenjataan serta dalam berbagai aspek. Kemudian para pasukan pemerintahan mengalami kemunduran dikarenakan beberapa aparat memihak kepada oposisi. Namun, pertempuran masih berlangsung sehingga menyebabkan korban berjatuhan semakin banyak.

Dengan konflik yang terus terjadi serta kurangnya perkembangan di Suriah menyebabkan Negara- Negara sekutu semakin kuat membantu para pemberontak. Para pemberontak ini juga dibantu oleh Negara- Negara seperti Turki, Arab Saudi serta Qatar. Sedangkan pihak pejuang dibantu oleh Iran, kelompok militan Libanon serta para pejuang Hizbullah untuk melawan para pemberontak. Penggunaan senjata kimia menjadikan konflik di Suriah memulai babak baru. Para kelompok oposisi memberi klaim bahwa yang melakukan serangan ini adalah rezim Bashar Assad. Klaim sebaliknya dilontarkan oleh pihak pejabat, yang dimana mereka berkata

³⁰ John O. Voll John L. Esposito, Tamara Sonn, *Islam and Democracy after the Arab Spring*, 1st edn (New York: Oxford University Press, 2015).

bahwa senjata yang digunakan dalam penyerangan tersebut dilakukan oleh pihak pemberontak³¹.

Masih berlangsungnya konflik di Suriah menandakan bahwa Negara tersebut belum mencoba untuk menerima demokratisasi yang terjadi pada *Arab Spring*. Kebangkitan politik Islam terasa dengan bangkitnya para aktivis yang melakukan penyerangan terhadap pihak musuh untuk menegakkan kebebasan di negaranya. Para aktivis itu juga memperjuangkan agar otoriterian yang terjadi di Suriah dapat segera berakhir. Pegangan rakyat Suriah terhadap Syariat Islam yang kuat menjadikan Negara ini belum dapat terlalu menerima demokrasi dalam pemerintahannya.

C. Forward Strategy for Freedom in the Middle East

Amerika mengeluarkan sebuah strategi yang dikenal dengan “Forward Strategy of Freedom in the Middle East” menjadi sebuah jawaban adanya keterlibatan Amerika dalam demokratisasi yang terjadi di Timur Tengah. Hegemoni Amerika terhadap Timur Tengah sudah dimulai sejak akhir perang dingin antara blok barat dan blok timur. Keberhasilan blok barat membuat Amerika berusaha keras untuk membendung penyebaran paham komunis di seluruh dunia termasuk di Timur Tengah. Selain melakukan penghentian paham komunis, Amerika juga melakukan penyebaran paham demokrasi yang diakui sebagai system pemerintahan terbaik. Untuk memperkuat kekuatannya, Amerika pada masa Regan banyak menjalin hubungan dengan Negara- Negara seperti Israel, Jordania dan Arab Saudi.

Dalam sebuah pidato yang dikemukakan pada tahun 2003, Presiden Bush mengatakan bahwa demokrasi dan Islam dapat berjalan berdampingan. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya demokrasi di Turki dan juga Indonesia. Amerika telah menyebarkan demokrasi ke tempat yang belum pernah ada sebelumnya, dan Presiden Bush percaya bahwa demokrasi akan meningkatkan perdamaian dan keamanan bagi negaranya dan

³¹ Muchaddam dan A.M. Kartamaatmaja Fahham, A, ‘Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya’, *Politics*, 5.1 (2014), 37–60.

juga Timur Tengah. Pidatonya tersebut juga menjelaskan tentang Inisiatif Kemitraan Timur Tengah. Yaitu menetapkan inisiatif pertama untuk mendukung upaya reformasi politik dan pengembangan ekonomi melalui perempuan dan pemuda.

Pidato yang dipublikasikan pada tahun 2003 tersebut bisa dikatakan menjadi bukti keterlibatan Amerika dalam Arab Spring yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Ambisi Amerika dalam mendemokratisasikan negara- negara yang belum menerapkan demokrasi sangat terlihat. Hal tersebut dikarenakan Amerika dapat dengan leluasa bekerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan negara demokrasi sehingga dapat menguntungkan Amerika sendiri. Amerika membentuk GMEI (Greater Middle East Initiative) untuk melancarkan proses demokratisasi di Timur Tengah. Namun, menurut Eddie J. Girdner GMEI bukan dibentuk untuk memfasilitasi kebebasan di Timur Tengah, melainkan untuk mempermudah Amerika memperoleh kepentingannya. GMEI tidak lain adalah alat untuk perluasan dan konsolidasi neoliberalisme di Timur Tengah dan juga Indonesia.